

Regional Fiscal In Brief

Vol IX/November/2025

ALCo

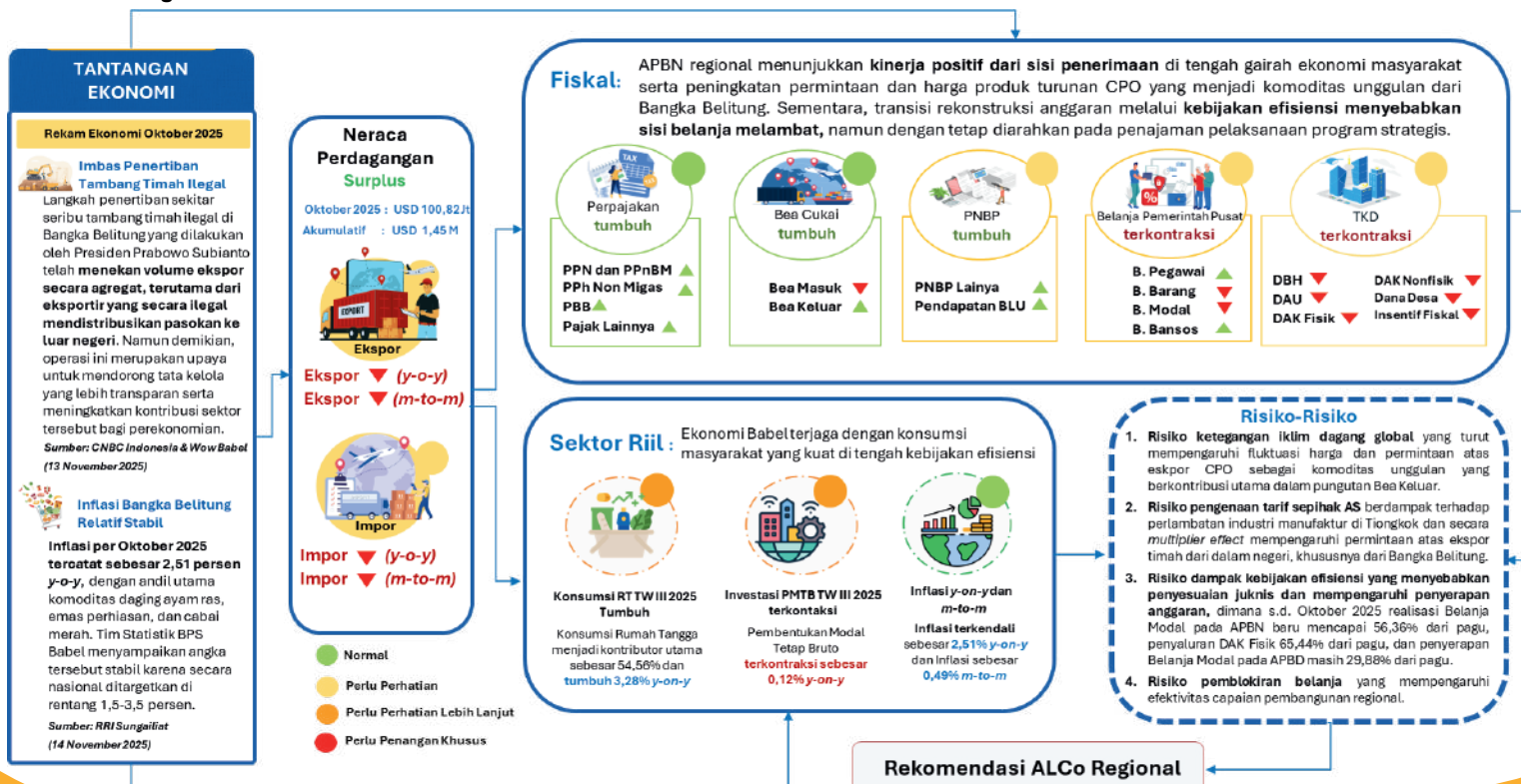
Provinsi Bangka
Belitung

EXECUTIVE SUMMARY

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan III tahun 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 3,12 persen *y-on-y*, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,13 persen. Pemulihan ini tidak terlepas dari perbaikan kondisi pasca kasus tata niaga timah pada tahun 2024 yang sempat mengguncang berbagai sektor potensial. Iklim usaha yang lebih kondusif di tahun 2025 menjadi penopang utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh signifikan 13,77 persen, yang didorong oleh terselenggaranya program MBG. Di sisi lain Industri Pengolahan juga tumbuh positif seiring produksi CPO dan turunannya yang mengalami peningkatan. Selain itu, Perikanan menjadi kontributor terbesar Lapangan Usaha Pertanian, yang tumbuh seiring peningkatan ekspor produk perikanan. Produk perkebunan tahunan seperti kelapa sawit dan karet juga mengalami peningkatan. Di tengah akselerasi berbagai sektor, inflasi regional pada Oktober 2025 terjaga pada tingkat 2,51 persen *y-on-y*, mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terkendali.

Dari sisi fiskal, hingga akhir Oktober 2025, penerimaan negara tumbuh 25,06 persen *y-on-y*. Sementara itu, kebijakan efisiensi mendorong perlambatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat terutama Belanja Barang dan Belanja Modal. Untuk mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif di tujuh kabupaten/kota, Belanja APBN masih didominasi Transfer ke Daerah yang mencapai 71,45 persen dari total belanja negara. Di sisi lain, realisasi pendapatan APBD konsolidasian turun 6,66 persen demikian pula dari sisi belanja terkonsentrasi sebesar 13,98 persen *y-on-y*.

Strategic Dashboard



PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

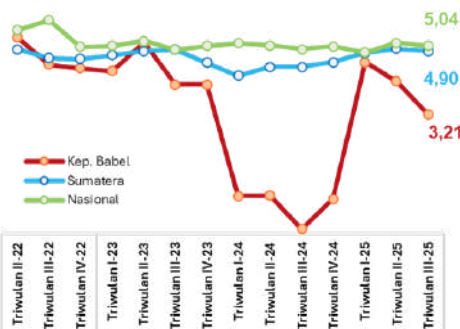
Pertumbuhan Ekonomi



c-to-c
3,95
persen

y-on-y
3,21
persen

q-t-q
-1,70
persen

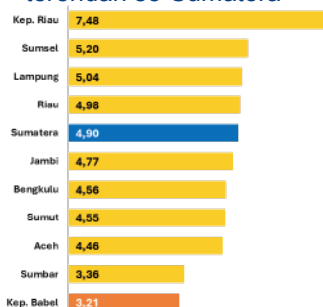


Secara y-on-y lebih rendah dari Sumatera & Nasional

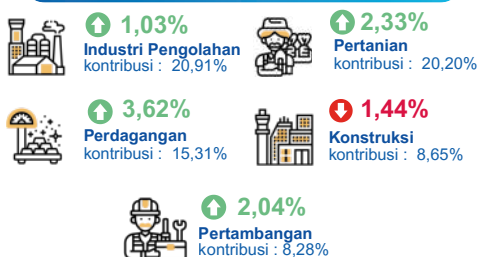
Sumatera ➡ 4,90%
Nasional ➡ 5,04%

Ekonomi Babel terjaga dengan konsumsi masyarakat yang kuat di tengah transisi rekonstruksi anggaran melalui kebijakan efisiensi

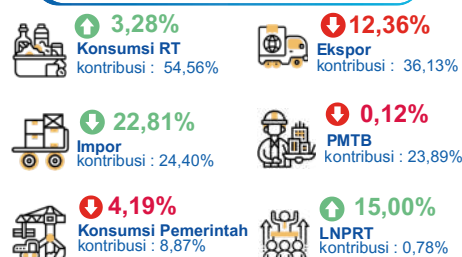
Laju Ekonomi Babel terendah se-Sumatera



PDRB LAPANGAN USAHA - TW III 2025



PDRB PENGELUARAN - TW III 2025



Inflasi

y-on-y
2,51
persen

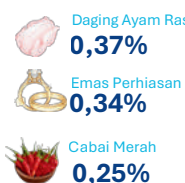
m-to-m
0,49
persen

y-to-d
1,84
persen



Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi y-on-y dengan peningkatan indeks sebesar 46,30% pada Oktober 2025

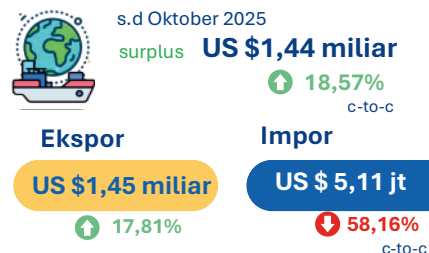
Komoditas Penyumbang Inflasi (y-o-y)



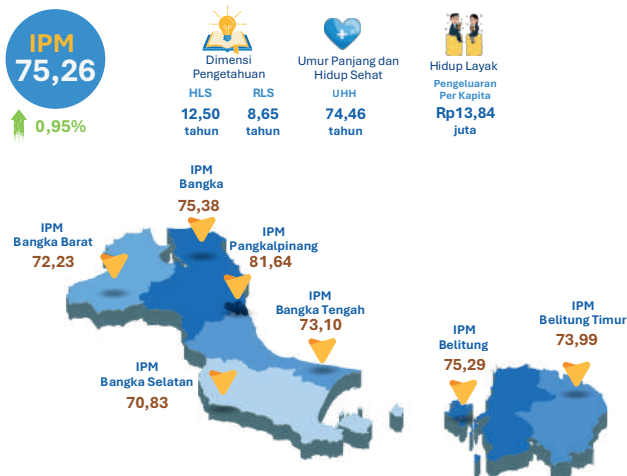
Komoditas Penyumbang Inflasi (m-to-m)



Neraca Perdagangan



Indikator Kesejahteraan



IPM Babel 2025 sebesar 75,26 termasuk kategori tinggi.

Peningkatan IPM tahun 2025 didukung oleh peningkatan semua dimensi penyusunnya, baik untuk Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, maupun Pengeluaran Riil per Kapita.

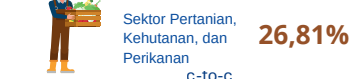
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Tingkat Pengangguran Terbuka



Serapan Tenaga Kerja Tertinggi

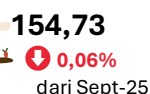


Garis Kemiskinan tertinggi ke-2 nasional
Rp956.833



Tingkat kemiskinan Babel Maret 2025 sebesar 5,00 persen. Capaian tersebut terendah keempat secara nasional.

NTP Oktober-25

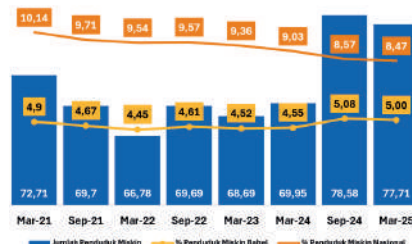


NTN Oktober-25



UMP Babel 2025
Rp3.876.600
naik 6,5% dari 2024

Gini Rasio Mar-2024
0,222
terendah se-nasional



Highlight KINERJA APBN

s.d. 31 November 2025

Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah efisiensi Belanja Negara

I-Account APBN Kep. Bangka Belitung

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Negara

Rp2,97 T

▲ 25,06% yoy

- Kontribusi **Penerimaan Perpajakan** masih mendominasi sebesar **92,21 persen** dari total Pendapatan Negara.

Belanja Negara

Rp7,72 T

▼ 9,55% yoy

- Belanja negara masih didominasi TKD yaitu sebesar **71,45 persen**.

Defisit Anggaran

Rp4,75 T

Pendapatan Negara

- **Penerimaan Pajak** tumbuh sebesar 20,68% seiring dengan penggalan potensi perpajakan yang optimal di Kep. Babel. Terdapat perubahan target untuk KPP di Kep. Babel semula Rp3,125 T menjadi Rp3,426 T seiring dengan membaiknya ekonomi dan ekspor di Pulau Bangka.

- **Bea Keluar mendominasi** dalam poster Bea Cukai sebesar 98,16%. Penerimaan Oktober sebesar Rp20,22 miliar, meningkat signifikan dibandingkan September 2025, yang didukung oleh realisasi Bea Keluar yang sangat tinggi atas ekspor Produk Turunan CPO (RBD Palm Olein).

- Kontribusi terbesar **PNBP** bersumber dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, yang dikontribusikan Pendapatan STNK dan BPKP satker Kepolisian, seiring adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

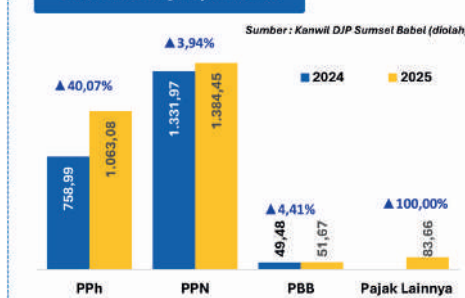
Belanja Negara

- **Belanja Barang** dan **Belanja Modal** terdampak signifikan atas kebijakan efisiensi, terutama belanja barang non operasional dan peradilan setelah berakhirnya masa Pemilu, serta penurunan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum turun 75,00% karena penurunan pagu dan masih rendahnya realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman.

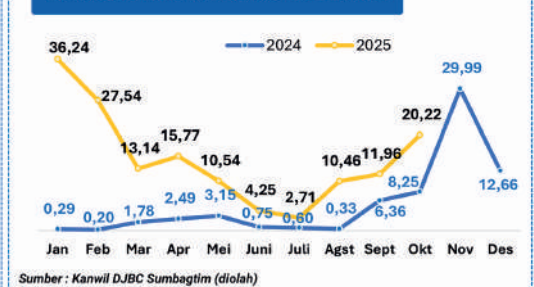
- Penyaluran komponen **TKD** telah mencapai lebih dari 70%, kecuali realisasi DAK Fisik yang baru mencapai 65,44% dari pagu karena beberapa proyek pembangunan masih dalam proses pengerjaan. Capaian TKD pada Pemda di regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah tersalurkan 80,26% - 86,40% dari pagu, dan terendah di Kota Pangkalpinang.

Uraian	2024			2025			% Growth	
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi
a	b	c	c/b	e	f	f/e		
A. Pendapatan Negara	3.659,50	2.372,14	64,82%	3.604,03	2.966,65	82,31%	▼ -1,52%	▲ 25,06%
I. Penerimaan Dalam Negeri	3.659,50	2.372,14	64,82%	3.604,03	2.966,65	82,31%	▼ -1,52%	▲ 25,06%
1. Penerimaan Perpajakan	3.511,98	2.164,65	61,64%	3.442,06	2.735,69	79,48%	▼ -1,99%	▲ 26,38%
a. Pajak Dalam Negeri	3.448,10	2.140,58	62,08%	3.426,35	2.583,25	75,39%	▼ -0,63%	▲ 20,68%
Pajak Penghasilan Non Migas	1.591,18	758,99	47,70%	1.260,27	1.063,08	84,35%	▼ -20,80%	▲ 40,07%
Pajak Pertambahan Nilai	1.726,64	1.331,97	77,14%	2.133,67	1.384,45	64,89%	▲ 23,57%	▲ 3,94%
Pajak Bumi dan Bangunan	101,10	49,48	48,94%	32,20	51,67	160,45%	▼ -68,15%	▲ 4,41%
Cukai	-	0,13	0,00%	-	0,39	0,00%	▲ 0,00%	▲ 200,80%
Pajak Lainnya	29,18	0,01	0,03%	0,20	83,66	41.300%	▼ -99,31%	▲ 826.699%
b. Pajak Perdagangan Internasional	63,88	24,07	37,68%	15,71	152,44	970,11%	▼ -75,40%	▲ 533,29%
Bea Masuk	5,29	5,23	98,82%	5,48	2,43	44,31%	▲ 3,57%	▼ -53,56%
Bea Keluar	58,59	18,84	32,16%	10,23	150,01	1.466%	▼ -82,54%	▲ 896,21%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	147,52	207,49	140,65%	161,96	230,96	142,60%	▲ 9,79%	▲ 11,31%
Pendapatan PNB Lainnya	97,24	162,48	167,09%	108,18	174,87	161,65%	▲ 11,25%	▲ 7,63%
Pendapatan Badan Layanan Umum	50,28	45,01	89,51%	53,78	56,09	104,29%	▲ 6,96%	▲ 24,62%
B. Belanja Negara	10.473,50	8.530,08	81,44%	9.750,64	7.715,64	79,13%	▼ -6,90%	▼ -9,55%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.702,96	2.643,79	71,40%	3.171,69	2.202,92	69,46%	▼ -14,35%	▼ -16,68%
Belanja Pegawai	1.303,92	1.096,64	84,10%	1.380,41	1.198,53	86,82%	▲ 5,87%	▲ 9,29%
Belanja Barang	1.776,39	1.176,30	66,22%	1.355,40	756,05	55,78%	▼ -23,70%	▼ -35,73%
Belanja Modal	614,48	364,31	59,29%	425,98	240,09	56,36%	▼ -30,68%	▼ -34,10%
Belanja Bantuan Sosial	8,18	6,53	79,84%	9,90	8,25	83,33%	▲ 20,97%	▲ 26,26%
II. Transfer ke Daerah	6.770,54	5.886,29	86,94%	6.578,95	5.512,72	83,79%	▼ -2,83%	▼ -6,35%
a. Dana Perimbangan	6.377,05	5.508,02	86,37%	6.207,97	5.181,40	83,46%	▼ -2,65%	▼ -5,93%
1) Dana Bagi Hasil	644,78	479,19	74,32%	565,54	458,09	81,00%	▼ -12,29%	▼ -4,40%
2) Dana Alokasi Umum	4.369,34	3.925,20	89,84%	4.384,56	3.787,76	86,39%	▲ 0,35%	▼ -3,50%
3) Dana Alokasi Khusus	1.362,92	1.103,62	80,97%	1.257,87	935,55	74,38%	▼ -7,71%	▼ -15,23%
- DAK Fisik	493,77	356,83	72,27%	302,65	198,05	65,44%	▼ -38,71%	▼ -44,50%
- DAK Nontifik	869,15	746,79	85,92%	955,22	737,50	77,21%	▲ 9,90%	▼ -1,24%
b. Insentif Fiskal	98,10	87,27	88,96%	71,82	68,32	95,14%	▼ -26,79%	▼ -21,71%
c. Dana Desa	295,39	291,01	98,52%	299,17	262,99	87,91%	▲ 1,28%	▼ -9,63%
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	- 6.813,99	- 6.157,94	90,37%	- 6.146,61	- 4.748,99	77,26%	▼ -9,79%	▼ -22,88%

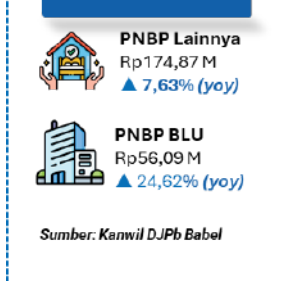
Realisasi Pajak per Jenis



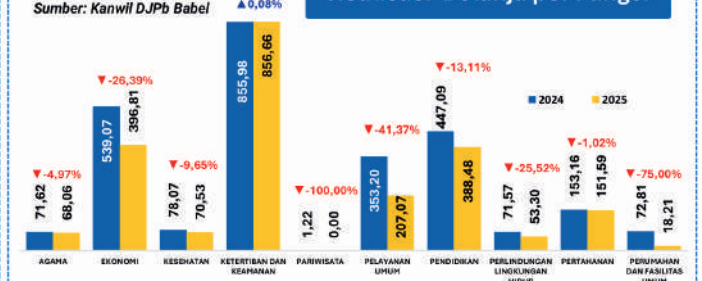
Realisasi Bea dan Cukai Per Bulan



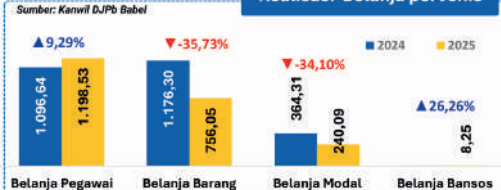
Realisasi PNBP



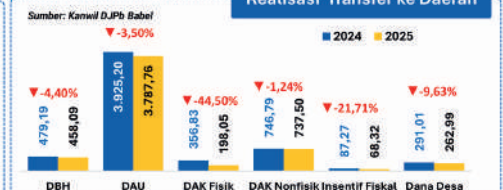
Realisasi Belanja per Fungsi



Realisasi Belanja per Jenis



Realisasi Transfer ke Daerah



Highlight KINERJA APBD

s.d. 31 November 2025

I-Account APBD Konsolidasian

(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Daerah Konsolidasi

Rp6,27 T

▼ 6,66% yoy

- Kontribusi **Pendapatan dari Dana Transfer** masih mendominasi sebesar **75,36 persen** dari total Pendapatan Daerah.

Belanja Daerah Konsolidasi

Rp5,79 T

▼ 13,98% yoy

- Kontribusi Belanja Daerah didominasi dari **Belanja Operasi** sebesar **85,66 persen**.

Surplus Anggaran

Rp481,69 M

URAIAN	2024			2025			% Growth
	Pagu	Realisasi	% Real	Pagu	Realisasi	% Real	
A. Pendapatan	8.874,52	6.718,50	75,71%	8.832,82	6.271,19	71,00%	-6,66%
I. Pendapatan Asli Daerah	2.079,89	1.285,01	61,78%	2.109,10	1.532,78	72,67%	19,28%
- Pajak Daerah	1.513,30	876,51	57,92%	1.407,46	995,62	70,74%	13,59%
- Retribusi Daerah	153,94	91,91	59,70%	415,74	335,83	80,78%	265,40%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57,05	52,81	92,57%	57,28	43,94	76,71%	-16,79%
- Lain-Lain PAD yang Sah	355,60	263,79	74,18%	228,62	157,39	68,84%	-40,33%
II. Pendapatan dari Dana Transfer	6.748,95	5.433,01	80,50%	6.704,68	4.725,79	70,49%	-13,02%
III. Lain - lain Pendapatan Daerah	45,69	0,48	1,06%	19,05	12,62	66,23%	2517,19%
B. Belanja Daerah dan Transfer	10.113,77	6.730,66	66,55%	9.641,26	5.789,50	60,05%	-13,98%
I. Belanja Operasi	8.042,62	5.584,84	69,44%	7.976,68	4.959,29	62,17%	-11,20%
- Belanja Pegawai	4.067,37	3.196,25	78,58%	4.616,63	3.130,49	67,81%	-2,06%
- Belanja Barang dan Jasa	3.523,29	2.005,76	56,93%	3.175,41	1.665,19	52,44%	-16,98%
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- Belanja Subsidi	2,14	1,58	73,58%	2,43	1,48	60,79%	-6,41%
- Belanja Hibah	427,82	367,58	85,92%	159,15	148,91	93,57%	-59,49%
- Belanja Bantuan Sosial	22,01	13,68	62,13%	23,07	13,22	57,33%	-3,29%
II. Belanja Modal	1.220,09	547,06	44,84%	920,78	275,14	29,88%	-49,71%
III. Belanja Tidak Terduga	94,75	3,86	4,07%	71,82	3,89	5,41%	0,70%
IV. Transfer Pemerintah Daerah	756,31	594,90	78,66%	671,98	551,19	82,02%	-7,35%
- Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0,00	34,20	0,00%	27,60	52,32	189,56%	52,97%
- Transfer Bantuan Keuangan	756,31	560,70	74,14%	644,38	498,87	77,42%	-11,03%
C. Surplus/Defisit Anggaran	-1.239,25	-12,15	0,98%	-808,43	481,69	-59,58%	-4063,14%
D. Pembiayaan Daerah	1.239,25	621,91	50,18%	808,43	199,17	24,64%	-67,97%
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.362,95	697,20	51,15%	893,54	251,72	28,17%	-63,90%
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	123,69	75,29	60,87%	85,11	52,55	61,74%	-30,21%
SILPA		609,76			680,86		11,66%

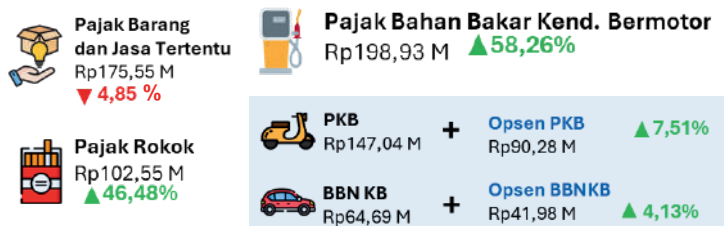
- Secara kumulatif, **Pendapatan Asli Daerah** didominasi oleh Pajak Daerah dengan kontribusi 64,95%, dan tumbuh sebesar 13,59% seiring dengan pulihnya ekonomi Babel.
- Kinerja **Retribusi Daerah** tumbuh positif dan signifikan sebesar 265,40% yoy yang dipengaruhi oleh peningkatan kinerja seluruh komponen retribusi daerah dan reklasifikasi pendapatan BLUD Kesehatan ke Retribusi Jasa Umum.
- Lain-lain PAD yang Sah** turun akibat reklasifikasi, meskipun terjadi peningkatan signifikan pada komponen Pendapatan dari Pengembalian dan Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, serta Pendapatan dari Pengembalian.

- Belanja Pegawai** turun 2,06% yoy karena kontraksi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Daerah. Sedangkan sebagian besar komponen belanja lainnya mengalami pertumbuhan.
- Belanja Barang dan Jasa** melambat 16,98% yoy sebagai akibat turunnya kinerja Belanja Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa.
- Belanja Modal** berkontraksi cukup dalam sebesar 49,71% yang didominasi oleh penurunan Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dan Belanja Modal Bangunan Air.

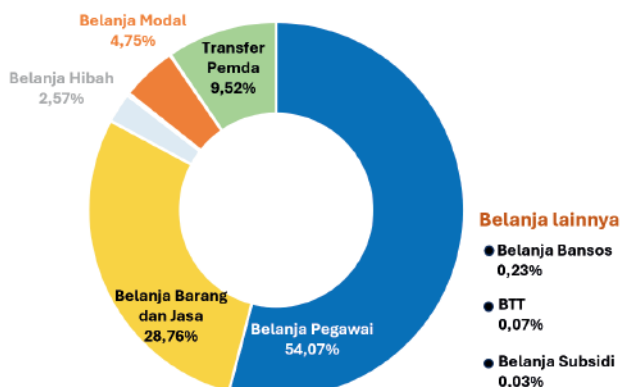
Kinerja Pajak Barang dan Jasa Tertentu



Top 5 Pajak Daerah



Proporsi Belanja Daerah dan Transfer



- Sampai akhir Oktober 2025, **Belanja Pegawai** mendominasi **54,07%** dari total realisasi belanja daerah. Sementara, **Belanja Modal** hanya berkontribusi **4,75%** dari total belanja daerah.
- Pemda lingkup Kep. Bangka Belitung perlu mengupayakan penurunan proporsi Belanja Pegawai secara bertahap sesuai ketentuan UU No.1 Tahun 2022 yang mengamankan alokasi Belanja Pegawai maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah dan Transfer, dan selanjutnya diiringi belanja infrastruktur sebesar 40%.

Kemandirian Fiskal Bangka Belitung Tercatat Rendah

Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Pemerintah Daerah konsolidasian di Kepulauan Bangka Belitung hingga Oktober 2025 tercatat sebesar **0,24**, masih stabil dibandingkan capaian Oktober 2024. Berdasarkan kriteria, IKF tersebut masih berada pada kategori Belum Mandiri (0,00–0,25). Kondisi ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan Belanja Daerah. Dalam hal ini, Pemda masih sangat bergantung pada Dana Transfer, mengingat PAD baru dapat membiayai sekitar 26,48% dari total Belanja Daerah.

ISU TEMATIK REGIONAL

Penertiban Smelter Timah & Implikasi Pemotongan Transfer ke Daerah

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung



Ekonomi Babel Terhimpit: Smelter Belum Jalan, TKD Dipangkas Rp 245 Miliar

Kompas.com, 11 Oktober 2025, 09:40 WIB

Heru Dahnur, Reni Susanti
Tim Redaksi



Pemerintah pusat saat berada di smelter timah sitaan negara di Tinindo Intermusa, Pangkalpinang, Senin (6/10/2025). (Biro Pers Istana.)

Key Talking Issue

Penyerahan enam *smelter* rampasan negara kepada PT Timah Tbk. dinilai belum berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah Bangka Belitung. Direktur Babel Resources Institute (BRiNST), Teddy Marbinanda menyatakan bahwa smelter yang diserahkan belum siap untuk dioperasikan, sehingga memerlukan waktu sebelum dapat berfungsi secara optimal. Keberadaan enam smelter tersebut tidak dapat dijadikan tumpuan untuk menggerakkan perekonomian daerah yang sedang mengalami pemangkasan anggaran. Oleh karenanya, pemerintah daerah agar mencari alternatif lain agar pembangunan tetap dapat berjalan dengan baik.

Pengaruh dana pusat terhadap pembangunan Provinsi Kep. Bangka Belitung sangat besar, dengan porsi TKD mencapai 58,8% dari total pendapatan APBD 2025, sedangkan PAD hanya berkontribusi sebesar 41,2%.

Pada tahun 2026, pemerintah provinsi harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran karena dana transfer dari pusat dipangkas sebesar Rp 245 miliar. Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD diperkirakan meningkat menjadi 61,5%, sedangkan PAD berkontribusi sebesar 38,5%.

Analysis

Ketergantungan pada komoditas dasar dan hilirisasi belum maksimal:

Provinsi Bangka Belitung selama ini identik dengan industri pertambangan khususnya timah. Namun, bila fasilitas pengolahan seperti smelter belum beroperasi, maka:

- Nilai tambah lokal terbatas, dimana hanya ekstraksi dan ekspor mentah sehingga margin rendah.
- Potensi lapangan kerja dan *multiplier effect* industri pengolahan tidak optimal.
- Risiko bagi daerah, dimana saat harga komoditas turun atau produksi terganggu, dampaknya langsung ke APBD berupa penurunan dana bagi hasil (DBH) dan berpengaruh ke ekonomi lokal.

Efisiensi Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026:

- Efisiensi anggaran TKD sebenarnya tidak mengganggu program yang berdampak pada masyarakat karena program yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dialihkan ke Pemerintah Pusat melalui program/kegiatan di Kementerian/Lembaga teknis.
- Pemerintah Daerah membutuhkan penyesuaian atas kebijakan efisiensi anggaran agar pelaksanaan program yang didanai oleh APBD tidak terganggu.

Strategi Kebijakan

1 Pemerintah daerah agar mendorong percepatan realisasi/operasionalisasi *smelter* dengan memastikan **izin operasional terpenuhi dan pelibatan tenaga kerja lokal** untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Bangka Belitung.

2 Pemerintah daerah perlu melakukan **diversifikasi** ekonomi agar tidak terlalu tergantung pada satu sektor seperti hasil tambang timah.

3 Pemerintah daerah agar melakukan **kajian potensi diversifikasi PAD** untuk mengurangi ketergantungan pada dana TKD.



DIVERSIFIKASI EKONOMI: PERIKANAN DAN PARIWISATA

- Produksi perikanan air tawar di Bangka Tengah meningkat pada 2025. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas *cold storage*, memperkuat logistik, serta mendorong industri pengolahan (misalnya bakso ikan, fillet, kerupuk, *frozen food*, dll).
- Sektor pariwisata juga menunjukkan peningkatan pada 2025. Pemda perlu mengutamakan infrastruktur destinasi, kebersihan pantai, dan paket wisata terintegrasi. Selain itu, pemda dapat mendorong Babel sebagai *remote worker destination* (kombinasi pantai dan *work from paradise*) seperti halnya di Bali, dengan memperkuat sarpras termasuk akses digital.
- Mendorong keterlibatan petani dan nelayan lokal sebagai penyedia bahan baku untuk program MBG, sehingga program gizi juga jadi injeksi ekonomi desa (*multiplier* ke PDRB & pendapatan rumah tangga).



PENGEMBANGAN TENAGA KERJA

- Untuk mengurangi lulusan menganggur karena kompetensi tidak relevan, Pemprov bersama Dinas Pendidikan agar melakukan evaluasi dan revisi kurikulum SMK dan vokasi ke empat sektor utama: pariwisata, perikanan, agribisnis, dan TIK. Pemda dapat **bekerja sama dengan perusahaan swasta** seperti PT Timah dan **industri perhotelan** untuk menyusun program pelatihan dan program magang untuk tujuan perekrutan pegawai.
- **Program Reskilling dan Skema Transisi Pekerja Tambang.** Pemda bersama BLK dapat menyusun program pelatihan untuk pekerja terdampak PHK sektor pertambangan dengan fokus perikanan, pertanian, dan pariwisata.

OPTIMALISASI KINERJA APBN DAN APBD



- Satker perlu **memitigasi potensi penumpukan belanja di akhir tahun** menyusul implementasi INAPROC dalam proses pengadaan, memetakan belanja terutama yang bernominal besar yang berpotensi RPATA terutama untuk anggaran yang baru turun di Semester II atau baru dibuka blokirnya.
- **Pemda perlu melakukan modernisasi sistem pajak daerah berbasis digital** (*e-tax*, *e-retribusi*), diversifikasi sumber retribusi dari sektor pariwisata, transportasi laut, dan jasa pelabuhan dalam rangka optimalisasi peningkatan PAD.
- **Pemda dapat memanfaatkan *Creative Financing*** untuk proyek-proyek infrastruktur daerah, misalnya melalui KPBU dan pembiayaan lainnya
- Pemda dapat melakukan **optimalisasi pemanfaatan BMD sebagai sumber PAD.**



APBN regional menunjukkan kinerja positif dari sisi penerimaan di tengah gairah ekonomi masyarakat serta peningkatan permintaan dan harga produk turunan CPO yang menjadi komoditas unggulan dari Bangka Belitung. Sementara, transisi rekonstruksi anggaran melalui kebijakan efisiensi menyebabkan sisi belanja melambat, namun dengan tetap diarahkan pada penajaman pelaksanaan program strategis.

